



Judul : RI Juara kasus campak, komisi IX serukan percepat imunisasi
Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RI Juara Kasus Campak Komisi IX Serukan Percepat Imunisasi

ANGGOTA Komisi IX DPR Nurhadi menyoroti posisi Indonesia di peringkat kedua dunia dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Kondisi tersebut harus menjadi alarm bersama sistem kesehatan nasional.

Karena itu, dia menyerukan mempercepat dan meratakan cakupan imunisasi di seluruh daerah. "Campak merupakan penyakit yang secara ilmiah dapat dicegah melalui imunisasi," ujar Nurhadi dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) periode Juli 2025-Desember 2025 mencatat, Yaman sebagai negara tertinggi dengan 11.288 kasus campak, disusul Indonesia dengan 10.744 kasus dan India sebanyak 9.666 kasus.

Peningkatan kasus campak, lanjut Nurhadi, menunjukkan cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata. Sebetulnya, target tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan ambang batas untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Jika ada daerah yang cakupan imunisasinya rendah, maka di situlah potensi wabah muncul. Dan yang paling rentan terdampak adalah anak-anak," kata politikus Nasdem ini.

Ia menyebut, ada tiga faktor yang perlu dievaluasi secara jujur atas tidak tercapainya target minimal imunisasi sebanyak 95 persen secara nasional. Pertama, dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan cakupan imunisasi rutin sempat menurun dan belum sepenuhnya pulih.

Kedua, ketimpangan akses layanan kesehatan di sejumlah

wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan. Ketiga, masih adanya misinformasi yang memengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap imunisasi.

Nurhadi menegaskan, perlindungan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama negara. Karena itu, DPR akan mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan percepatan imunisasi kejar secara nasional. Tujuannya untuk memperkuat sistem surveilans atau deteksi dini, serta memastikan respons cepat terhadap setiap potensi KLB.

DPR juga akan memastikan distribusi vaksin dan tenaga kesehatan benar-benar merata hingga ke daerah. "Target 95 persen harus tercapai bukan hanya secara nasional, tetapi merata di setiap kabupaten dan kota," tegasnya.

Untuk itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pem-pus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu diperkuat karena keberhasilan program imunisasi sangat bergantung pada pelaksanaan di tingkat daerah. Persoalan ini bukan semata soal peringkat global, melainkan soal komitmen negara dalam melindungi generasi masa depan.

"Imunisasi adalah hak anak dan kewajiban negara untuk memastikan terpenuhi tanpa diskriminasi wilayah maupun latar belakang sosial," kata dia.

Diketahui, International Health Regulation (IHR) dari Otoritas Kesehatan Australia menemukan dua kasus campak pada warga negara asing (WNA) dengan riwayat perjalanan dari Indonesia pada Februari 2026. ■ TIF